

Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal (BPU) di Kota Meulaboh

Vista Claudia^{1*}, Universitas Teuku Umar, IndonesiaSyahril², Universitas Teuku Umar, Indonesia

ABSTRACT

The Employment Social Security Organizing Agency (BPJS Ketenagakerjaan) is a legal institution that provides social security to workers who have fixed wages, and also provides assistance to non-wage workers such as fishermen, laborers, and even traders. One of the BPJS Employment branches that provides protection for the informal sector is the Meulaboh BPJS Employment Branch. This is important because in Meulaboh, many people work in the informal sector. The purpose of this research is to analyze how the Meulaboh BPJS Ketenagakerjaan Branch works to increase the number of workers in the informal sector in Meulaboh City, West Aceh. This research uses a qualitative method that describes and explains the situation based on the object of research analyzed by checking the truth of the information obtained from the field. The data used is primary data, which is collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the participation of non-wage workers in the BPJS Ketenagakerjaan program is still low in the informal sector, and many are not registered. This is a problem because in West Aceh there are more workers in the informal sector compared to the formal sector. The lack of protection from labor social security causes unprotected informal workers to immediately get protection from BPJS Employment.

ARTICLE HISTORY

Received 09/01/2024

Revised 16/01/2024

Accepted 23/01/2024

Published 23/02/2024

KEYWORDS

berikan maksimal 5 kata kunci dipisahkan oleh tanda baca semi-colon (;).

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ claudiavista971@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak bisa lepas dari sektor informal. Sektor informal ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional di Indonesia. Menurut Unicef mengatakan banyaknya anak di Indonesia sudah putus sekolah dari umur 13-15 tahun dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang tidak baik. Hal tersebut dikarenakan Pendidikan sangat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Semakin tinggi tamatan Pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan seseorang tersebut dalam bekerja (Merizal, 2018). Pendidikan rendah tersebut membuat pekerjaan yang didapatkan kurang baik atau masuk ke dalam sektor informal, seperti buruh, nelayan, penjual nasi, penjual di roko dan lain sebagainya.

Sektor informal di Indonesia semakin meningkat dilihat dari data BPS tahun 2023 pekerja informal sudah mendominasi sebanyak 83.34 juta Orang, hal tersebut menyatakan bahwa masih banyak sektor informal di Indonesia dibuktikan dari masih banyaknya mereka yang berjualan kaki lima di trotoar jalan, di halte untuk melakukan penjualan. Tentunya hal tersebut perlu ditangani dikarenakan dengan banyaknya sektor informal tersebut membuat pemandangan kota terlihat sangat tidak baik di lihat. Tingginya peran sektor informal dalam perekonomian Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama: pertama, pertumbuhan angkatan tenaga kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal; kedua, arus migrasi desa- kota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor industri modern di kota (Lathifa Hapsari, 2015).

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang memberikan penyelenggaraan berupa jaminan sosial bukan hanya kepada penerima upah saja tetapi juga memberikan bantuan kepada bukan penerima upah seperti nelayan, buruh sampai dengan pedagang bisa mendapatkan jaminan tersebut. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh yang juga memberikan perlindungan di sektor informal kepada masyarakatnya, dikarenakan Meulaboh sendiri masih banyak masyarakat yang berkerja di sektor informal. Masyarakat sektor informal tersebut haruslah menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan seperti resiko yang terjadi pada sektor informal tersebut lebih tinggi di bandingkan tenaga kerja lainnya. Jika banyaknya sektor

informal yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya meningkatkan pembangunan nasional Indonesia, mengurangi pengangguran saja tetapi juga bisa mendapatkan sebuah jaminan bila pekerja informal tersebut mengalami resiko sosial yang bisa kapan saja terjadi.

Upaya mewujudkan Tenaga Kerja sektor informal atau tenaga kerja mandiri adalah tenaga kerja yang bekerja di luar pekerjaan di sertai dengan berbagai tantangan dan resiko yang di ambil. Oleh karena itu pekerja sektor informal harus di berikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas negara. Piyoto (2007) menegaskan hal ini dalam konteks ekonomi makro, sektor informal pada umumnya berupa usaha, industri rumah tangga dan penyediaan jasa kecil. Tumbuh kembang di sektor informal terbukti berhasil ketersediaan solusi alternatif untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan informasi dan situasi berdasarkan objek penelitian yang diuji dengan menganalisis kebenaran berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Kajian ini sesuai yang disampaikan Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moloeng (2012:4) bahwa metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh Aceh Barat Jalan Nasional Meulaboh -Tapaktuan KM 4 Meurebo Kabupaten Aceh Barat dan dilakukan mulai dari Januari sampai Mei 2023. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pimpinan BPJS Cabang Meulaboh, Antara lain Kepala Bidang Kepesertaan, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Umum. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan, diantaranya ialah;

1. Teknik wawancara.

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung Kepala Bidang Kepesertaan, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Umum.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.

3. Teknik Dokumentasi.

Teknik Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber dokumentasi seperti kumpulan dokumen-dokumen perusahaan, jurnal dan artikel ilmiah terbaru.

PEMBAHASAN

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal

Program jaminan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja informal adalah salah satu program yang di perlu kan dalam ke pesertaan untuk menjaga perlindungan pekerja informal. Adapun manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterapkan di BPJS ketenagakerjaan cabang Meulaboh terdiri dari 5 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan hilang pekerjaan. Hal ini dilihat dari pernyataan Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh menyampaikan bahwa :

“Program BPJS ketenagakerjaan telah diatur melalui Undang-Undang yang telah disahkan. Semua warga pekerja di Indonesia diwajibkan untuk terlindungi oleh program ini. Proses pendaftaran sebagai peserta melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mendaftar, cukup menggunakan KTP, dan data akan diproses. Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, termasuk kepala daerah, dinas pendidikan, kantor pos, dan pegadaian. Mereka bertugas menyosialisasikan program ini dengan turun langsung ke lapangan, mempromosikan kepada warga, kerabat yang bekerja, perusahaan-perusahaan, hingga ke tingkat desa atau kecamatan, serta melakukan survei lokasi.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh melaksanakan dua program utama. Pertama, program yang diatur oleh Undang-Undang, yaitu program jaminan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pensiun (JP)

sesuai dengan Pasal 5 ayat (2). Kedua, program sosialisasi yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mempromosikan dan menarik pekerja informal yang belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

Angkatan Kerja dan Pekerja Informal

Indonesia, sebagai salah satu negara terpadat di dunia, terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dalam satu dekade terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa pada pertengahan 2022, meningkat sebesar 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 272,68 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja pada periode 2019-2021 mencapai 86.855 jiwa.

Dari hasil wawancara dengan Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh, terungkap bahwa terdapat 72.400 pekerja penerima upah dan 57.745 pekerja di sektor jasa konstruksi yang telah terdaftar. Namun, untuk pekerja bukan penerima upah, hanya terdapat 4.256 tenaga kerja yang terlindungi. Jumlah ini menunjukkan ketimpangan perlindungan antara sektor formal dan informal, terutama di Aceh Barat yang memiliki banyak pekerja sektor informal. Kekurangan perlindungan dari jaminan sosial ketenagakerjaan menyebabkan perlunya upaya lebih intensif untuk memastikan bahwa tenaga kerja informal yang belum terdaftar segera mendapatkan perlindungan yang layak.

Pekerja penerima upah, yang merupakan pekerja formal, meliputi PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS, dan pegawai swasta. Sedangkan pekerja bukan penerima upah, yang termasuk dalam kategori pekerja informal, meliputi pedagang, pengamen, supir angkot, tukang becak, tukang cukur, tukang pijat, dan lainnya. Semua pekerja, baik dari sektor informal maupun formal, memiliki kebutuhan akan jaminan sosial untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan sosial kesejahteraan di Indonesia dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Strategi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meningkatkan Kepesertaan pada Sektor Informal

Program jaminan sosial diharapkan dapat menarik pekerja informal untuk bergabung, namun kenyataannya 90 persen pekerja sektor informal di Indonesia tidak terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berarti bahwa pekerja informal masih belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan standar jaminan sosial minimum menurut konvensi ILO, seperti perawatan medis, biaya saat sakit, biaya selama menganggur, hari tua, kecelakaan kerja, biaya keluarga, kehamilan, cacat, dan warisan. Ini terungkap dari pernyataan Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh.

"Upaya untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam program jaminan sosial di kantor cabang Meulaboh dilakukan melalui strategi 345, yang terdiri dari tiga strategi utama, empat fokus, dan lima elemen kunci. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Strategi utama terdiri dari sistem keagenan, peran tokoh masyarakat, peran suplai, sistem autodebet, dan pengawasan positif. Tiga strategi utama ini diimplementasikan melalui empat fokus, yaitu ekosistem desa, ekosistem pasar, e-commerce/UKM, dan pekerja rentan".

"Elemen kunci yang digunakan adalah sistem keagenan, peran tokoh masyarakat, peran suplai, sistem autodebet, dan pengawasan positif. Sistem keagenan bertujuan untuk mengoptimalkan peran agen perisai, agen desa, dan koperasi dalam meningkatkan partisipasi sektor informal atau BPU. Peran tokoh masyarakat dan publik digunakan untuk menggandeng tokoh masyarakat Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peran suplai berfokus pada peningkatan tenaga kerja melalui ekosistem perusahaan di Aceh Barat. Sistem autodebet diharapkan dapat menjaga kontinuitas partisipasi tenaga kerja informal. Pengawasan positif dilakukan melalui kerjasama internal dan eksternal untuk memperluas partisipasi tenaga kerja, khususnya di sektor informal. Dengan demikian, ada lima elemen kunci dalam upaya meningkatkan partisipasi tenaga kerja di sektor BPU atau masyarakat yang dikenal sebagai pekerja informal"

Berdasarkan hasil wawancara, strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah strategi 345, yang terdiri dari tiga strategi utama, empat fokus, dan lima elemen kunci. Tiga strategi utama mencakup refedisi, intensifikasi, dan ekstensifikasi. Sedangkan empat fokus adalah ekosistem desa, ekosistem pasar, e-commerce/UKM, dan pekerja rentan. Lima elemen kunci, atau yang disebut

sebagai meliputi sistem keagenan, peran tokoh, rantai pasokan, sistem autodebet, dan pengawasan positif. Upaya untuk meningkatkan partisipasi dilakukan melalui penerapan kelima elemen kunci tersebut. Dengan demikian, strategi jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal melalui pendekatan yang terstruktur dan holistik.

Kendala dan hambatan dalam penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Indonesia dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk mendaftar di BPJS ketenagakerjaan masih rendah. Di negara lain, regulasi yang jelas mewajibkan semua penduduk memiliki BPJS ketenagakerjaan, yang diperlukan untuk urusan penting seperti surat tanah atau perjalanan ke luar negeri. Namun, di Indonesia, sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran masih belum optimal, sehingga banyak masyarakat belum memulai untuk mendaftar. Selanjutnya, hambatan lainnya berasal dari pemerintah yang belum menetapkan regulasi yang cukup kuat untuk mewajibkan pendaftaran BPJS ketenagakerjaan. Di sektor perusahaan, pekerja dengan status penerima upah memiliki regulasi yang jelas tentang kepemilikan BPJS ketenagakerjaan, namun hal ini tidak berlaku bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan, petani, dan pedagang kaki lima, yang memiliki aturan sendiri. Meskipun terdapat regulasi di UUD No 24 tahun 2011 tentang BPJS, serta imbauan untuk mewajibkan pendaftaran, namun belum ada penegakan hukum yang cukup kuat terkait regulasi tersebut, sehingga banyak masyarakat masih enggan untuk mendaftar sebagai peserta. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepesertaan masih memerlukan usaha yang besar, termasuk untuk peserta khusus, terutama di sektor informal.

Aspek Potensial

Aspek potensi ini sangat penting dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan semua pekerja informal mendapatkan perlindungan. Sebagaimana disampaikan oleh Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh, potensi ini masih terbuka lebar, terutama di sektor informal (BPU) seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Contohnya, petani dan nelayan, yang merupakan mayoritas di sektor ini, masih belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Diperlukan upaya melalui 4 fokus dan 5 elemen kunci, dengan menggarap ekosistem desa, pasar, pekerja rentan, *e-commerce*, dan UKM, untuk memastikan bahwa semua pekerja informal, terutama yang berada di pasar, desa, petani, dan nelayan, terlindungi.

Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh menegaskan bahwa semua pekerja, baik formal maupun informal, seperti nelayan dan petani, memiliki potensi dalam ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pekerja sektor informal, terutama pedagang kecil dan UMKM, yang belum terdaftar dalam jaminan sosial. Diperlukan upaya untuk mengenali keahlian melalui pengalaman kerja, sumber daya manusia yang unggul, dan kompetensi di bidang-bidang yang dikuasai. Namun, informasi mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masih kurang tersampaikan secara spesifik kepada pekerja informal di Kota Meulaboh, sehingga banyak warga dengan pendapatan minim tidak tertarik mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

SIMPULAN

Hambatan utama dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut. Di negara lain, regulasi yang jelas mengharuskan seluruh penduduknya memiliki BPJS ketenagakerjaan untuk keperluan penting seperti mengurus surat tanah atau perjalanan ke luar negeri. Namun, di Indonesia, regulasi semacam itu masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kepesertaan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah menggunakan pendekatan strategi 345. Ini terdiri dari tiga strategi utama, yaitu refedisi, intensifikasi, dan ekstensifikasi, serta empat fokus, seperti ekosistem desa, ekosistem pasar, *e-commerce*/UKM, dan pekerja rentan. Lima elemen kunci, seperti sistem keagenan, peran tokoh, rantai pasokan, sistem autodebet, dan pengawasan positif, juga digunakan untuk mencapai peningkatan kepesertaan. Dengan demikian, inilah strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

REFERENSI

- Abdullah, Junaidi. 2018. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9(1): 121.
- Ardianingsih, Arum, Juandy Seiver Langelo, and Pandu Wicaksono. 2021. "Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 21(2): 8.
- Baskoro, F. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Buka (Abdullah 2018; Ardianingsih, Langelo, and Wicaksono 2021; Diana and Syarvina 2022; Hapsari 2015)n Penerima Upah Pada BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Perintis Ponorogo (Doctoral dissertation, lain Ponorogo).
- BPJS Ketenagakerjaan (2021): <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>
- Diana, and Wahyu Syarvina. 2022. "Analysis of BPJS Employment Membership for Informal Sector Workers in Medan City (Case Study of BPJS Employment, North Medan Branch)." *Jurnal EMAK (Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan* 3(2): 479–84. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>.
- Ezah, W. (2019). Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Hapsari, Lathifa. 2015. "Peran Sektor Informal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Pedagang Pasar Tugu Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 03(02): 1–20.
- Kurniawati, W., & Rachmayanti, R. D. (2018). Identifikasi penyebab rendahnya kepesertaan JKN pada pekerja sektor informal di kawasan pedesaan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), 33.
- Nasution, A. K. (2021). Analisis Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Masa Pandemi Covid-19.
- Soedarto, D. J. P. H. Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Rendy Syachrezi*), Rina Martini*), Neny Marlina*)
- Syachrezi, R. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Vivi Pusvitha, I. (2023). Efektivitas Strategi Promosi BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan pada Pekerja Sektor Informal (Studi pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung).
- Windari, N. K. A. I., Putra, I., & Astariani, P. S. P. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Zulfa, A. E., & Dwimawanti, I. H. (2018). Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 519-532